

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang Masalah

Perpindahan penduduk dari Ukraina ke luar negaranya sudah dimulai sejak sebelum Perang Dunia I dan berlanjut selama masa Uni Soviet. Ada banyak alasan yang menyebabkan orang-orang Ukraina meninggalkan tanah kelahirannya, seperti tekanan ekonomi, politik, dan kebijakan pemindahan paksa oleh pemerintah. Seperti pada tahun 1939-1941 lebih dari satu juta orang dideportasi dari Ukraina bagian barat oleh pemerintahan Soviet setelah wilayah itu dimasukkan ke dalam Uni Soviet lewat perjanjian Molotov-Ribbentrop. Setelah perang selesai, sekitar 200.000 orang lagi juga dipindahkan secara paksa karena dianggap tidak setia secara politik. Selain itu, kelompok-kelompok etnis minoritas di Ukraina seperti orang Jerman, Tatar Krimea, Polandia, Bulgaria, Armenia, dan Yunani juga mengalami penindasan dan deportasi massal pada tahun 1930-an dan 1940-an. (Malynovska, 2006).

Lalu, pada masa Uni Soviet, migrasi terjadi secara besar-besaran dikarenakan kebijakan pemerintah yang membuat banyak penduduk Ukraina dipindahkan secara paksa ke berbagai wilayah untuk bekerja di proyek industri dan sosialisme Uni Soviet (Shevel, 2011). Akibat dari kebijakan relokasi ini, penduduk Ukraina tersebar ke berbagai daerah, tidak hanya di dalam Ukraina saja tetapi juga ke wilayah Soviet lainnya. Perpindahan ini berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Ukraina, karena banyak komunitas yang terpecah dan identitas lokal yang berubah. Ketika kita melihat sejarah migrasi ini secara keseluruhan baik yang terjadi secara sukarela sebelum Perang Dunia I, maupun yang dipaksakan oleh negara di masa Soviet, kita bisa memahami bahwa akar migrasi Ukraina sangat kompleks. Warisan migrasi ini bahkan masih terlihat sampai sekarang, karena pola pergerakan penduduk dan persebaran komunitas Ukraina di luar negeri sudah terbentuk sejak lama (Oleinikova, 2017).

Sejarah migrasi Ukraina bisa dibagi ke dalam beberapa gelombang yang dimulai sejak akhir abad ke-19. Gelombang pertama terjadi pada masa Perang Dunia I, saat banyak orang Ukraina yang tinggal di pedesaan memutuskan untuk pindah karena tekanan politik dan ekonomi yang berat dari pemerintah Rusia dan Austria-Hungaria. Saat itu, warga dari

Ukraina Timur banyak yang pindah ke daerah seperti Siberia dan Altai, sementara warga dari Ukraina Barat lebih memilih pindah ke Amerika. Gelombang kedua muncul di antara dua perang dunia, setelah runtuhnya kekaisaran besar seperti Rusia, Austria dan Hungaria. Perubahan peta kekuasaan ini membuat banyak warga Ukraina terpaksa berpindah tempat. Lalu, gelombang ketiga terjadi setelah Perang Dunia II, terutama karena program pemerintah Soviet yang memobilisasi rakyat untuk proyek-proyek besar sosialisme, termasuk dengan memindahkan mereka secara paksa (Fedyuk & Kindler, 2016).

Ketiga gelombang tersebut umumnya dianggap sebagai bentuk migrasi karena alasan politik baik karena penindasan, perang, maupun kebijakan negara. Namun setelah Ukraina merdeka tahun 1991, muncul gelombang keempat, yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini, orang-orang Ukraina banyak yang pindah ke luar negeri karena alasan ekonomi. Negara sedang mengalami krisis keuangan, pasar tenaga kerja berubah, dan pendapatan masyarakat tidak stabil. Para peneliti menyebut periode ini sebagai “migrasi gelombang keempat,” yang menunjukkan bahwa setelah merdeka, Ukraina menghadapi tantangan baru berupa tekanan ekonomi yang memaksa banyak warganya mencari penghidupan di luar negeri (Fedyuk & Kindler, 2016).

Setelah itu, sekitar tahun 2010-an, muncul gelombang kelima. Kali ini, penyebabnya lebih kompleks seperti permasalahan ekonomi Ukraina yang sedang menurun, pasar tenaga kerja semakin terbuka karena globalisasi, dan situasi politik memburuk, terutama setelah Rusia mencaplok wilayah Krimea pada tahun 2014. Menariknya, gelombang migrasi ini banyak diisi oleh orang-orang dengan pendidikan tinggi atau keahlian khusus. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran baru bagi Ukraina, karena kehilangan warga yang punya kemampuan justru bisa merugikan pembangunan jangka panjang negara, fenomena ini sering disebut dengan *brain drain* (Adema et al., 2023).

Setelah Ukraina merdeka, negara ini mengalami ketidakstabilan ekonomi yang cukup parah. Pengangguran tinggi dan kondisi keuangan yang sulit membuat banyak warga Ukraina memilih untuk pergi ke luar negeri demi mencari pekerjaan. Uni Eropa menjadi tujuan utama mereka. Namun, karena terbatasnya akses kerja di negara-negara Eropa dan ijazah atau keahlian mereka sering tidak diakui, banyak dari mereka akhirnya bekerja di sektor informal atau pekerjaan dengan keterampilan rendah. Pada tahun 1990-an hingga awal 2000-an, migrasi tenaga kerja dari Ukraina banyak dikarenakan oleh kebutuhan

ekonomi. Negara-negara seperti Polandia, Italia, dan Spanyol menjadi tujuan favorit karena kesempatan kerja yang lebih terbuka (Adema et al., 2023).

Seiring meningkatnya tekanan ekonomi pasca-kemerdekaan, pola migrasi tenaga kerja dari Ukraina mulai menyebar lebih luas ke negara-negara Eropa Tengah dan Timur, tidak hanya terbatas pada tujuan tradisional seperti Italia atau Polandia. Dorongan utama tetap berasal dari faktor ekonomi, namun adanya jaringan migran yang sudah mapan serta kedekatan geografis ikut memengaruhi arah perpindahan. Negara-negara yang sebelumnya hanya dianggap sebagai transit, mulai menarik perhatian karena pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kebutuhan tenaga kerja yang terus meningkat. Dalam konteks ini, Republik Ceko perlahan muncul sebagai salah satu tujuan baru yang menjanjikan, karena sektor industrinya berkembang pesat dan mulai bergantung pada tenaga kerja asing, termasuk dari Ukraina (Strielkowski et al., 2012).

Pada tahun 2007, terjadi peningkatan dalam migrasi bersih ke Republik Ceko, dengan sekitar 83.945 migran masuk ke negara tersebut, yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan tingginya permintaan tenaga kerja setelah Republik Ceko bergabung dengan Uni Eropa. Pergeseran ini mengubah pola migrasi, di mana Ceko yang sebelumnya lebih dikenal sebagai negara transit mulai menjadi tujuan utama bagi para migran yang mencari pekerjaan dan standar hidup yang lebih baik. Selama periode ini, pertumbuhan ekonomi yang pesat menyebabkan kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor seperti konstruksi, manufaktur, dan jasa, sehingga menarik pekerja asing, terutama dari Slovakia, Ukraina, dan Vietnam (EMN, 2009).

Sebagai bagian dari Uni Eropa, perbatasan yang terbuka dan kebijakan pergerakan bebas dalam Wilayah Schengen menjadikan Republik Ceko semakin menarik bagi migran tenaga kerja, dikarenakan gaji yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi. Meskipun migran memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, kekhawatiran terkait keamanan dan integrasi budaya mulai muncul. Beberapa kelompok dalam masyarakat menunjukkan sikap menolak meningkatnya jumlah pekerja asing di negara tersebut. Peristiwa migrasi tahun 2007 kemudian menjadi titik awal bagi kebijakan migrasi dan strategi integrasi tenaga kerja Republik Ceko di masa mendatang (EMN, 2009)

Situasi semakin memburuk ketika krisis ekonomi global melanda pada tahun 2008. Krisis tersebut membuat kondisi ekonomi di Ukraina dan beberapa negara Eropa menjadi

tidak stabil. Oleh karena itu, banyak warga Ukraina yang mulai mengembangkan strategi migrasi sementara, yang artinya mereka bekerja di luar negeri untuk waktu tertentu, lalu kembali ke Ukraina, atau berpindah-pindah antarnegara tergantung di mana ada peluang kerja. Strategi ini menjadi cara bertahan hidup di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu (Fedyuk & Kindler, 2016).

Berlanjut pada krisis migrasi Eropa pada tahun 2015 menyebabkan masuknya pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Suriah, Afghanistan, dan Irak. Meskipun Republik Ceko bukan tujuan utama pencari suaka, negara ini mengalami perdebatan publik dan ketegangan politik yang meningkat seputar migrasi. Ceko menerima sejumlah besar permohonan suaka, terutama dari Ukraina, Rusia, dan Vietnam, yang mencerminkan hubungan historisnya dengan negara-negara tersebut. Namun, kebijakan suaka yang ketat menyebabkan hanya sebagian kecil pemohon yang diberi status pengungsi, di mana kurang dari 3% pencari suaka menerima perlindungan antara tahun 1997 dan 2019 (Seidlová, 2020.). Secara politis, dengan partai-partai populis seperti Partai Kebebasan dan Demokrasi Langsung memanfaatkan ketakutan publik yang menjadikan retorika antimigrasi mendapat perhatian. Penolakan terhadap proposal UE untuk kuota relokasi pengungsi semakin menguatkan kecenderungan sekritisasi Republik Ceko terhadap kebijakan mengenai migrasi (Bartoszewicz & Eibl, 2022).

Migrasi bersih meningkat menjadi sekitar 20.064 pada 2016 karena Republik Ceko terus menghadapi kompleksitas dalam kebijakan migrasi UE dan sentimen domestik. Pertumbuhan ini didorong oleh peluang ekonomi yang menarik para pekerja migran daripada pencari suaka. Meskipun ada upaya Eropa yang lebih luas untuk mengatasi krisis melalui mekanisme solidaritas, pemerintah Ceko mempertahankan sikap restriktif dalam menerima pengungsi. Sikap publik sebagian besar tetap negatif, dengan survei menunjukkan penentangan kuat terhadap pemukiman kembali migran di dalam UE. Fokus bergeser ke arah pengelolaan migrasi legal yang dapat menguntungkan ekonomi sambil menolak kuota relokasi wajib yang diusulkan oleh Brussels (Bartoszewicz & Eibl, 2022).

Jumlah penduduk asing legal di Republik Ceko mencapai sekitar 632.570 pada tahun 2017, mewakili sekitar 5,1% dari total populasi. Warga negara Ukraina muncul sebagai kelompok penduduk asing yang memenuhi permintaan tenaga kerja di berbagai industri utama seperti konstruksi dan manufaktur. Melalui amandemen Undang-Undang tentang Tempat Tinggal Warga Negara Asing, kebijakan ini menekankan regulasi ketat tentang

tempat tinggal dan integrasi yang tetap berfokus pada migrasi ekonomi daripada suaka kemanusiaan. Pengungsi atau pemohon suaka diizinkan untuk mengajukan izin kerja enam bulan setelah mengajukan permohonan suaka. Kebijakan ini bertujuan untuk mengintegrasikan pengungsi ke pasar tenaga kerja sambil memastikan kepatuhan terhadap prosedur hukum (Ministerstvo vnitra České republiky, 2017).

Pengungsi yang diberikan perlindungan tambahan atau suaka dapat mengajukan izin tinggal jangka panjang, yang memungkinkan mereka untuk tinggal di Republik Ceko secara legal dan mengakses peluang kerja dengan diberlakukannya persyaratan dokumentasi yang ketat. Amandemen tersebut juga memperkenalkan pembatasan hak reunifikasi keluarga untuk kategori warga negara asing tertentu, termasuk pengungsi. Kebijakan ini membatasi kemampuan pengungsi untuk membawa anggota keluarga ke negara tersebut, dengan mengutamakan masalah keamanan nasional (Ministerstvo vnitra České republiky, 2017).

Pada tahun 2020, diperkirakan ada lebih dari 6,1 juta orang Ukraina yang tinggal di luar negeri. Bahkan jika dihitung secara keseluruhan, jumlah diaspora Ukraina di seluruh dunia bisa mencapai lebih dari 20 juta orang yang tersebar di sekitar 60 negara. Negara-negara seperti Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Brasil, Moldova, dan Argentina menjadi tempat tinggal komunitas Ukraina terbesar. Di kawasan Uni Eropa, banyak pekerja migran Ukraina memilih pindah ke Polandia, Jerman, Italia, dan Republik Ceko karena negara-negara ini letaknya dekat dengan Ukraina dan menawarkan peluang kerja yang lebih baik (Adema et al., 2023)

Komunitas diaspora Ukraina tidak hanya tinggal dan bekerja di luar negeri, tapi juga sangat aktif dalam mendukung perjuangan negara asal mereka. Mereka ikut berperan dalam berbagai gerakan penting, seperti Revolusi Oranye pada 2004, aksi protes Euromaidan pada 2013, dan berbagai usaha Ukraina untuk mengambil kembali wilayahnya yang diduduki setelah 2014. Selain itu, diaspora ini juga membantu Ukraina dengan mengirimkan uang, melakukan kampanye internasional, serta menyebarkan informasi melalui media untuk mengajak dunia memahami situasi sulit yang dihadapi Ukraina, terutama dalam menghadapi agresi dari Rusia (Adema et al., 2023)

Melihat sejarah panjang migrasi warga Ukraina, bisa disimpulkan bahwa konflik, perubahan politik, dan kebijakan pemerintah selalu menjadi faktor utama yang mendorong

orang-orang Ukraina untuk pindah dari negaranya. Situasi pengungsi yang terjadi saat ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari pola tersebut, namun kali ini kondisinya jauh lebih buruk karena adanya perang yang melibatkan Rusia. Pada 24 Februari 2022, Rusia menyerang Ukraina secara langsung, dan hal ini membuat situasi keamanan serta stabilitas negara menjadi sangat rapuh. Serangan ini juga menyebabkan banyak korban sipil dan menghancurkan fasilitas penting seperti rumah, sekolah, dan rumah sakit. Karena keadaan yang sangat berbahaya, jutaan warga Ukraina akhirnya terpaksa meninggalkan rumah mereka demi mencari perlindungan di tempat yang lebih aman (Gerlach & Ryndzak, 2022).

Agresi militer Rusia terhadap Ukraina pada 24 Februari 2022 mendorong jutaan warga Ukraina meninggalkan rumah mereka untuk mencari tempat yang aman. Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) melaporkan bahwa pada awal April 2022, lebih dari 4 juta orang telah melintasi perbatasan internasional, mencari perlindungan terutama di negara-negara tetangga dan di seluruh Uni Eropa. Skala perpindahan ini belum pernah terjadi sebelumnya di Eropa sejak Perang Dunia II, hal ini menyoroti terancamnya warga sipil yang berada di zona konflik dan juga menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan bantuan kemanusiaan dan kerja sama internasional (STEM, 2025).

Republik Ceko, yang terletak di Eropa Tengah, menjadi salah satu tujuan utama bagi para pengungsi Ukraina. Pemerintah mengambil kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan mendesak akan bantuan kemanusiaan dan hak-hak mereka yang melarikan diri dari konflik. Pemerintah Ceko menerapkan skema perlindungan sementara yang memungkinkan para pengungsi Ukraina untuk tinggal secara legal di negara tersebut hingga dua tahun. Status ini memberikan akses ke layanan penting, termasuk perawatan kesehatan, pendidikan, dan tunjangan sosial. Untuk memfasilitasi integrasi pengungsi, pemerintah mendirikan berbagai layanan dukungan seperti pusat informasi yang didirikan untuk membantu pengungsi melewati proses hukum dan birokrasi. Pemerintah daerah dan para NGO menyelenggarakan inisiatif untuk menyediakan perumahan, makanan, dan layanan penting lainnya. Hal ini menumbuhkan rasa solidaritas dan dukungan bagi mereka yang membutuhkan, karena Republik Ceko menyambut lebih dari 200.000 pengungsi Ukraina pada awal tahun 2022 (STEM, 2025).

Tabel 1. 1 Negara Tujuan Pengungsi Ukraina per 28 Februari - 25 April 2022

Nama Negara	Jumlah Pengungsi
Polandia	2.922.978
Romania	782.598
Rusia	614.318
Hungaria	496.914
Moldova	435.275
Slovakia	357.560
Jerman	331.600
Republik Ceko	300.000
Bulgaria	185.000
Italia	95.000

Sumber: UNHCR, 2022

Menurut data UNHCR, Republik Ceko tercatat telah menerima sekitar 300.000 pengungsi Ukraina. Angka ini sangat signifikan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk negara tersebut, dan menjadikan Ceko sebagai salah satu penerima pengungsi terbanyak di kawasan Eropa Tengah dalam periode tersebut. Tingginya angka pengungsi menunjukkan respons cepat dan terbuka dari pemerintah Ceko yang dengan segera menerapkan skema Perlindungan Sementara (*Temporary Protection Directive*) yang memungkinkan pengungsi Ukraina memperoleh izin tinggal legal, akses terhadap layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, serta kesempatan untuk bekerja secara legal di negara tersebut. Pada saat itu, proses registrasi pengungsi dilakukan secara besar-besaran di pusat-pusat pendaftaran yang disediakan pemerintah. Pengungsi yang datang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak, karena laki-laki Ukraina berusia produktif sebagian besar tidak diperbolehkan meninggalkan negara mereka karena wajib militer (UNHCR, 2024)

Pada 30 November 2023, Republik Ceko telah menyediakan tempat berlindung bagi sekitar 371.325 orang yang melarikan diri dari konflik di Ukraina, termasuk warga negara ketiga yang diberikan perlindungan sementara. Arus masuk yang signifikan ini telah menempatkan Republik Ceko di antara negara-negara Eropa terkemuka dalam hal penerimaan pengungsi Ukraina per kapita. Mayoritas pengungsi yang terdiri dari perempuan dan anak-anak mencerminkan bahwa kelompok inilah yang paling terdampak oleh pengungsian akibat konflik tersebut. (Šed'ová et al., 2024).

Dalam penanganannya, upaya pemerintah Republik Ceko sangat proaktif, dengan menerapkan kebijakan untuk memfasilitasi integrasi pengungsi ke dalam masyarakat.

Anak-anak Ukraina telah diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan Republik Ceko, bersekolah bersama teman-teman sebaya mereka di Republik Ceko. Kebijakan tersebut tidak hanya memastikan keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak yang mengungsi, tetapi juga mendorong pertukaran budaya dan saling pengertian di antara para siswa. Selain itu, sekitar 100.000 pengungsi Ukraina telah mendapatkan pekerjaan di berbagai sektor ekonomi Republik Ceko, yang berkontribusi pada kemandirian mereka dan pasar tenaga kerja lokal (Šed'ová et al., 2024).

Sentimen publik mengenai krisis pengungsi Ukraina di Republik Ceko sebagian besar juga mendukung, sangat berbeda dengan sentimen publik terhadap krisis pengungsi sebelumnya yang berasal dari Suriah atau Afghanistan. Dukungan ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, termasuk ikatan historis dan pengalaman bersama pada saat penindasan di bawah kekuasaan Soviet. Banyak warga Ceko yang berempati dengan penderitaan pengungsi Ukraina, dan menumbuhkan sikap ramah terhadap mereka yang melarikan diri dari konflik. Pemerintah Ceko, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Petr Fiala, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap Ukraina dan para pengungsinya. Sikap politik ini memengaruhi sentimen publik, mendorong budaya penerimaan dan bantuan (STEM, 2025).

Di Ceko terdapat juga *Non Governmental Organization* (NGO) yang terkait dengan perubahan politik pasca-revolusi Ceko yaitu People in Need (PIN) yang dibuat oleh sekelompok jurnalis dan aktivis. PIN sangat erat kaitannya dengan dinamika politik pasca-Revolusi Beludru di Cekoslowakia pada tahun 1989. Revolusi ini mengakhiri kekuasaan rezim komunis dan membuka ruang bagi masyarakat sipil untuk berkembang. Setelah Ceko lepas dari pemerintahan komunis tahun 1989, masyarakat mulai bebas bersuara dan membuat organisasi sendiri. PIN berfokus pada bantuan kemanusiaan, hak asasi manusia, mendukung proyek-proyek pembangunan dan integrasi sosial baik di Republik Ceko maupun internasional. Dalam konteks ini, PIN menjadi simbol dari transisi menuju demokrasi, dengan nilai-nilai yang sejalan dengan cita-cita reformasi politik dan sosial pasca-komunis (People in Need, 2015).

PIN dikenal di Ceko sebagai *Člověk v tísni*, yang berpusat di Praha, Republik Ceko. Selama bertahun-tahun, PIN telah menjadi salah satu NGO terbesar di Eropa Tengah dan Timur, bekerja di lebih dari 30 negara dan mempekerjakan ratusan staf dan relawan. PIN beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip humanisme, kebebasan, kesetaraan, dan solidaritas.

Organisasi ini percaya bahwa semua orang harus memiliki hak untuk membuat keputusan tentang kehidupan mereka sendiri dan menikmati hak-hak yang diuraikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (People in Need, 2015.). Di Ceko, PIN aktif dalam program integrasi sosial, dengan fokus membantu orang-orang di komunitas yang dikecualikan secara sosial, seperti lingkungan Roma, dengan masalah-masalah seperti perumahan, pengangguran, pengelolaan utang, dan pendidikan (*Člověk v Tísni (People in Need)*, 2009).

Saat terjadinya krisis pengungsi, terutama setelah pecahnya perang di Ukraina, PIN telah berperan dalam mendukung para pengungsi yang tiba di Ceko. Negara ini menampung salah satu populasi pengungsi Ukraina terbesar di Eropa, baik dalam jumlah absolut maupun per kapita. PIN bekerja sama erat dengan pemerintah Ceko, khususnya Kementerian Dalam Negeri, serta dengan pemerintah daerah, LSM lain, dan organisasi internasional untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi ini (People in Need, 2015).

Kolaborasi tersebut memiliki beberapa bentuk. Misalnya, PIN membantu melaksanakan program yang didanai oleh hibah dari pemerintah Ceko dan donor internasional. Program-program ini meliputi pendistribusian buku teks bahasa Ceko, penyelenggaraan kursus bahasa, dan penyelenggaraan acara komunitas serta klub percakapan untuk membantu para pengungsi berintegrasi lebih lancar ke dalam masyarakat Ceko. PIN juga membantu mendirikan pusat informasi dan mempekerjakan koordinator dan juru bahasa untuk memandu para pengungsi seperti mencari akomodasi, menangani dokumen, dan mengakses perawatan medis (People in Need, 2015).

PIN tidak hanya terbatas pada bantuan langsung tetapi juga terlibat dalam penyelenggaraan pusat komunitas dan perkemahan, khususnya untuk anak-anak dan ibu, untuk membantu para pengungsi membangun hubungan sosial dan beradaptasi dengan lingkungan baru mereka. Pusat-pusat ini menawarkan berbagai kegiatan seperti seni, olahraga, dan acara budaya, yang tidak hanya membantu para pengungsi mempelajari bahasa Ceko tetapi juga memperkenalkan mereka pada adat istiadat dan tradisi setempat. PIN dan mitranya juga menyediakan dukungan psikologis seperti konseling dan terapi seni untuk membantu para pengungsi, khususnya anak-anak dan keluarga, mengatasi trauma dan stres. Layanan ini disesuaikan dengan kebutuhan khusus masing-masing individu, untuk memastikan bahwa dukungan tersebut relevan dan efektif (People in Need, 2015).

Untuk memastikan bantuan mereka sesuai dengan kebutuhan nyata para pengungsi, PIN melakukan survei dan wawancara di pusat-pusat mereka. Umpan balik ini membantu mereka menyesuaikan program dan menghubungkan para pengungsi dengan layanan sosial yang tepat. Pendekatan PIN selalu memberdayakan orang-orang sehingga mereka dapat mengelola hidup mereka secara mandiri sesegera mungkin. PIN menjalin kerja sama erat dengan berbagai lembaga pemerintah dan organisasi internasional untuk memastikan respons yang terkoordinasi dan komprehensif. Kolaborasi ini mencakup penyediaan tempat tinggal sementara, akses pendidikan bagi anak-anak pengungsi, serta integrasi sosial dan ekonomi bagi keluarga mereka. Melalui kolaborasi tersebut, PIN tidak hanya menanggapi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada solusi jangka panjang yang berkelanjutan bagi pengungsi di Republik Ceko (People in Need, 2015).

Pemerintah Ceko telah berulang kali memperpanjang skema perlindungan sementara bagi para pengungsi Ukraina, yang terbaru melalui RUU "Lex Ukraine VII", yang memungkinkan adanya perpanjangan setelah Maret 2025 jika diperlukan. Amandemen ini memungkinkan pengungsi Ukraina yang mandiri secara ekonomi dan tidak bergantung pada tunjangan negara untuk mengajukan izin tinggal jangka panjang, menggantikan status perlindungan sementara yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan memperkuat integrasi mereka ke dalam masyarakat Ceko (Interfax, 2024).

Transisi tersebut hanya diperbolehkan bagi mereka yang memenuhi syarat ketat, seperti integritas hukum, kemandirian ekonomi, dan telah tinggal lebih dari dua tahun di bawah perlindungan sementara. Status hukum ini tidak hanya memberikan hak untuk tinggal dan bekerja di negara tersebut, tetapi juga memastikan akses ke layanan penting seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan tunjangan sosial. Yang terpenting, para pengungsi dengan pekerjaan yang stabil dan tidak bergantung pada tunjangan negara dapat mengajukan permohonan tempat tinggal jangka panjang, dan setelah lima tahun, untuk tempat tinggal permanen. Pemerintah telah mengklarifikasi bahwa perlindungan sementara akan tetap berlaku selama krisis berlanjut, dengan komunikasi yang jelas kepada para pengungsi tentang setiap perubahan legislatif (Interfax, 2024).

Meskipun telah banyak literatur yang membahas krisis pengungsi Ukraina dari berbagai perspektif, sebagian besar studi sebelumnya cenderung lebih fokus pada aspek legal atau respons awal terhadap gelombang pengungsi juga pada negara-negara besar seperti Jerman, Polandia, atau Prancis dalam merespons krisis pengungsi, sementara penelitian ini

memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai peran negara Eropa Tengah seperti Republik Ceko serta dampak jangka menengah hingga panjang dari kebijakan seperti *Lex Ukraine* terhadap integrasi pengungsi ke dalam masyarakat belum banyak diteliti secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah Ceko benar-benar diterapkan di lapangan, sejauh mana kebijakan itu menjawab kebutuhan pengungsi Ukraina, dan tantangan apa saja yang muncul dalam prosesnya.

Penelitian ini akan memfokuskan analisis terhadap upaya pemerintah Republik Ceko dalam menangani krisis pengungsi Ukraina, dengan menyoroti tiga aspek utama yaitu urgensi krisis yang dihadapi, bentuk respons kebijakan yang telah dilakukan pemerintah, serta capaian dan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan integrasi pengungsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemerintah Ceko mengelola arus pengungsi Ukraina dan apakah strategi yang diterapkan cukup efektif dalam mendukung proses integrasi jangka panjang di kawasan Uni Eropa. Selain itu, akan dikaji sejauh mana pemerintah Ceko berkolaborasi dengan aktor non-negara seperti organisasi masyarakat sipil dalam mendukung integrasi sosial pengungsi.

Telah banyak penelitian yang membahas krisis pengungsi Ukraina di tingkat regional Uni Eropa maupun di negara-negara besar seperti Jerman dan Polandia, tetapi belum banyak kajian yang membahas peran negara seperti Republik Ceko, termasuk implementasi kebijakan *Lex Ukraine* dan keterlibatan aktor non-negara seperti *People in Need*. Republik Ceko merupakan salah satu negara yang menerima pengungsi Ukraina dalam jumlah besar jika dibandingkan dengan total jumlah penduduknya, dan merespons cepat terhadap krisis kemanusiaan tersebut.

Selain itu, kebijakan Ceko menjadi lebih terbuka dan mendukung integrasi pengungsi ke dalam masyarakat melalui akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pasar kerja. Penelitian ini akan mengisi celah dengan menyediakan analisis mendalam tentang efektivitas kebijakan pemerintah Ceko bagi pengungsi Ukraina di negaranya, khususnya melalui implementasi *Lex Ukraine* dan peran kolaboratif antar aktor dalam periode 2022–2024. Penelitian ini tidak hanya memperluas cakupan studi teoritis tentang kebijakan luar negeri, tetapi juga memberikan pemahaman secara praktis dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan efektif untuk menangani krisis pengungsi.

## **1.2. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, penulis menyimpulkan sebuah permasalahan yang menjadi bahan untuk diteliti dan akan merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana situasi krisis kemanusiaan di Ukraina pasca invasi Rusia 2022?
2. Bagaimana respon pemerintah Republik Ceko terhadap krisis kemanusiaan di Ukraina?
3. Bagaimana upaya langkah strategis Republik Ceko untuk ikut menangani dan membuat kebijakan-kebijakan atas krisis pengungsi Ukraina di negaranya?

## **1.3. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Penelitian ini secara umum akan membahas upaya Pemerintah Republik Ceko dalam menangani krisis pengungsi Ukraina yang terjadi sebagai dampak dari invasi Rusia ke Ukraina. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana Republik Ceko menangani arus masuk pengungsi dari Ukraina, dengan menitikberatkan pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan serta bagaimana implementasinya. Republik Ceko termasuk negara yang secara cepat mengadopsi Temporary Protection Directive (TPD) dari Uni Eropa, dan bahkan membuat kebijakan domestik khusus yang dikenal sebagai *Lex Ukraine*. Kebijakan ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga mencakup akses ke layanan public. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada wilayah Republik Ceko, tanpa membahas negara lain di kawasan Uni Eropa secara mendalam. Penelitian ini hanya menyoroti tindakan, kebijakan, dan posisi pemerintah Republik Ceko, baik secara nasional maupun dalam konteks hubungan dengan Ukraina, Uni Eropa dan organisasi internasional terkait. Penelitian ini dibatasi pada periode 2022 hingga akhir tahun 2024, yang mencakup masa setelah terjadinya invasi Rusia ke Ukraina hingga akhir tahun 2024 yang datanya dapat dianalisis secara relevan dan aktual untuk melihat bagaimana upaya awal hingga fase lanjutan dari kebijakan-kebijakan perlindungan pengungsi tersebut diimplementasikan oleh pemerintah Ceko.

## **1.4 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

1. Mengidentifikasi krisis kemanusiaan di Ukraina pasca Invasi Rusia 2022 dalam perspektif kebijakan luar negeri.

2. Menganalisis respon pemerintah Republik Ceko terhadap krisis kemanusiaan di Ukraina.
3. Mengkaji langkah strategis Republik Ceko dalam menangani krisis pengungsi Ukraina melalui perumusan dan penerapan kebijakan-kebijakan di dalam negeri.

#### **1.4.2. Kegunaan Penelitian**

1. Memberikan pemahaman mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Republik Ceko dalam merespons krisis pengungsi Ukraina.
2. Membantu pembaca memahami langkah konkret yang diambil Pemerintah Republik Ceko dalam pelaksanaan kebijakan tersebut untuk menangani krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung.
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai peran pemerintah Ceko dalam menangani krisis pengungsi Ukraina.

### **1.5. Kerangka Teoritis-Konseptual**

#### **1.5.1. Kebijakan Luar Negeri**

James N. Rosenau merupakan salah satu tokoh awal dalam studi kebijakan luar negeri yang dalam pandangannya, kebijakan luar negeri adalah keseluruhan sikap, tindakan, dan strategi yang dilakukan oleh suatu negara untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang dari lingkungan eksternal. Rosenau menekankan bahwa kebijakan luar negeri bukanlah respons yang bersifat reaktif atau spontan, melainkan merupakan hasil dari proses perumusan yang kompleks. Proses ini melibatkan berbagai aktor, baik individu maupun institusi, serta nilai-nilai dan kepentingan yang berkembang dalam sistem domestik dan internasional. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri dipandang sebagai upaya yang dirancang negara untuk merespons situasi global demi mencapai tujuan nasionalnya (Rosenau, 1980)

Salah satu kontribusi utama Rosenau adalah pengembangan konsep *linkage theory*, yang menyoroti keterkaitan erat antara faktor domestik (sistem nasional) dan faktor eksternal (sistem internasional) dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Dalam kerangka ini, kebijakan luar negeri dianalisis sebagai hasil interaksi antara kekuatan internal seperti budaya, sejarah, ekonomi, opini publik, serta kekuatan eksternal seperti dinamika sistem internasional, aliansi, dan isu-isu global. Rosenau berpendapat bahwa tidak ada kebijakan luar negeri yang sepenuhnya otonom dari pengaruh lingkungan domestik maupun internasional. Negara harus terus-menerus menyesuaikan diri dengan perubahan di kedua lingkungan tersebut, sehingga kebijakan luar negeri menjadi proses adaptasi yang berkelanjutan (Rosenau, 1980).

Selanjutnya, Rosenau mengidentifikasi sejumlah sumber utama yang memengaruhi perumusan kebijakan luar negeri. Sumber-sumber ini meliputi sumber sistemik (faktor eksternal seperti hubungan antarnegara dan tantangan dari sistem internasional), sumber masyarakat (faktor internal seperti budaya, sejarah, ekonomi, struktur sosial, dan opini publik), sumber pemerintahan (struktur politik, tanggung jawab, dan mekanisme pemerintahan), serta sumber idiosinkratik (kepribadian, pengalaman, dan nilai-nilai individu pengambil keputusan). Dalam beberapa karyanya, Rosenau juga menambahkan sumber peran (*role*) sebagai input penting, yaitu peran yang dijalankan oleh aktor dalam struktur pemerintahan. Dengan memperhatikan seluruh sumber ini, analisis kebijakan luar negeri menjadi lebih mendalam dan mampu menangkap kompleksitas proses pengambilan keputusan di tingkat negara (Rosenau, 1980).

Ia mengidentifikasi empat pola adaptasi yang dapat dilakukan negara dalam merespons tekanan internal dan eksternal diantaranya yaitu, *preservative adaptation* (responsif terhadap tuntutan internal dan eksternal), *acquiescent adaptation* (responsif terhadap tuntutan eksternal saja), *intransigent adaptation* (responsif terhadap tuntutan internal saja), dan *promotive adaptation* (tidak responsif terhadap keduanya). Setiap pola adaptasi ini membawa implikasi yang berbeda terhadap perubahan maupun kesinambungan kebijakan luar negeri. Negara yang mampu beradaptasi secara efektif cenderung lebih stabil dan sukses dalam mencapai tujuan nasionalnya, sedangkan negara yang gagal beradaptasi berisiko mengalami krisis atau kegagalan kebijakan (Rosenau, 1980).

Rosenau juga menekankan pentingnya pra-teori (*pre-theories*) dalam studi kebijakan luar negerinya. Pra-teori tersebut merupakan upaya untuk membangun prinsip-prinsip umum dan generalisasi dari berbagai studi kasus, sehingga penelitian kebijakan luar negeri tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu menghasilkan teori-teori yang dapat diuji secara komparatif antarnegara. Dengan pendekatan ini, Rosenau mendorong berkembangnya studi kebijakan luar negeri menjadi disiplin ilmiah yang kokoh, yang tidak hanya menjelaskan fenomena tertentu, tetapi juga mampu memprediksi pola-pola kebijakan luar negeri di berbagai konteks negara (Rosenau, 1980).

Selain itu, Rosenau mengakui adanya model *incremental* dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Dalam model ini, keputusan biasanya diambil secara bertahap dan tidak selalu berdasarkan perhitungan yang sepenuhnya rasional, karena keterbatasan informasi dan ketidakpastian situasi di luar negeri. Pilihan yang diambil biasanya merupakan hasil kompromi di antara para pembuat keputusan, bukan semata-mata keputusan yang paling tepat secara teoritis, tetapi disesuaikan dengan kondisi yang ada. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri adalah proses yang terus berubah, penuh dengan negosiasi, dan harus menyesuaikan diri dengan situasi yang terus berkembang (Rosenau, 1980).

Dalam kerangka Rosenau, kebijakan luar negeri juga dipandang sebagai seperangkat prinsip dan strategi yang dirancang untuk mencapai kepentingan nasional. Prinsip-prinsip ini menjadi panduan dalam merumuskan upaya langsung, mulai dari diplomasi, negosiasi, hingga penggunaan kekuatan militer jika diperlukan. Kebijakan luar negeri, menurut Rosenau, adalah aplikasi nyata dari politik luar negeri yang lebih luas, dan merupakan hasil dari mobilisasi sumber daya serta perencanaan strategis negara. Dengan demikian, kebijakan luar negeri tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam membentuk lingkungan eksternal yang menguntungkan bagi negara (Rosenau, 1980).

Rosenau menyatakan bahwa kebijakan luar negeri adalah instrumen utama negara untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal (Rosenau, 1980). Teori Rosenau menjelaskan bagaimana negara menjaga kepentingan nasional sekaligus menghadapi perubahan dan menjaga stabilitas di sistem internasional. Dengan pendekatan multi-level, teori ini membantu untuk memahami bagaimana negara merumuskan, mengambil keputusan, dan menjalankan kebijakan luar negeri di tengah tantangan global yang terus berubah. Teori ini juga memberi peluang untuk membandingkan kebijakan luar negeri antarnegara, sehingga memperkaya analisis dalam hubungan internasional.

Teori kebijakan luar negeri Rosenau digunakan untuk memahami bahwa kebijakan luar negeri Ceko terbentuk melalui proses yang kompleks, di mana faktor domestik seperti dinamika politik dalam negeri, identitas nasional, dan tekanan masyarakat berinteraksi erat dengan faktor eksternal seperti pengaruh Uni Eropa, NATO, serta tekanan dari Rusia. Melalui konsep *linkage theory* Rosenau, dapat menganalisis bagaimana perubahan situasi politik di dalam negeri seperti perubahan pemerintahan atau meningkatnya sentimen nasionalisme yang berdampak langsung pada sikap dan strategi negara dalam merespons krisis internasional, seperti konflik Rusia-Ukraina atau perubahan kebijakan keamanan di Eropa Timur.

Pola adaptasi yang dijelaskan Rosenau dapat membantu penulis melihat bagaimana Ceko memilih strategi responsif terhadap tekanan eksternal maupun internal demi menjaga stabilitas nasional. Dengan demikian, teori Rosenau dapat memberikan kerangka analisis yang kuat untuk menelaah kebijakan luar negeri Ceko sebagai hasil komunikasi aktif antara lingkungan domestik dan internasional, serta sebagai upaya menyesuaikan diri terhadap tantangan dan peluang di kawasan Eropa Tengah dan Timur.

### **1.5.2. Pengungsi**

Kunz mengemukakan bahwa status pengungsi tidak hanya ditentukan oleh perpindahan secara fisik dari satu negara ke negara lain, tetapi juga oleh keterputusan sosial dan politik antara individu dan negara asalnya. Kunz membagi pengungsi ke dalam tiga kategori utama berdasarkan hubungan identitas mereka dengan negara penerima serta motif pengungsian mereka. Pertama, *majority-identified refugees*, yaitu

mereka yang memiliki kesamaan budaya, etnis, atau ideologi dengan masyarakat negara penerima. Kedua, *events-related refugees*, yaitu pengungsi yang melarikan diri karena peristiwa mendadak dan ekstrem seperti konflik, invasi, atau bencana alam. Ketiga, *self-alienated refugees*, yaitu individu yang secara sadar menolak identitas atau sistem politik di negara asal mereka. Kunz menekankan bahwa persepsi negara penerima terhadap pengungsi sangat dipengaruhi oleh seberapa besar kesamaan identitas yang dirasakan antara masyarakat lokal dan pengungsi (Kunz, 1981).

Berdasarkan pandangan Kunz (1981), pemahaman terhadap kategori-kategori pengungsi ini berpengaruh langsung terhadap cara negara penerima merumuskan kebijakan dan memperlakukan pengungsi. Seperti *majority-identified refugees* cenderung lebih mudah diterima oleh masyarakat negara tujuan karena dianggap "serupa" secara kultural atau ideologis. Hubungan kedekatan ini menciptakan empati dan solidaritas, sehingga integrasi mereka ke dalam masyarakat sering kali berjalan lebih mulus. Sebaliknya, pengungsi yang masuk dalam kategori *self-alienated refugees* justru sering menghadapi penolakan karena mereka dianggap tidak memiliki kesamaan nilai atau bahkan bisa menjadi ancaman ideologis bagi negara penerima. Menurut Kunz, respons terhadap juga bergantung pada persepsi dan konstruksi sosial-politik yang muncul di negara tujuan (Kunz, 1981).

Kunz juga menyatakan bahwa perpindahan pengungsi sering kali menciptakan ketegangan antara kepentingan negara dan tuntutan kemanusiaan. Negara penerima dihadapkan pada dilema antara menjaga stabilitas sosial-politik internal dan memenuhi tanggung jawab moral serta hukum internasional terhadap perlindungan pengungsi. Pengungsi yang dinilai "dekat" dengan nilai-nilai negara penerima akan mendapatkan perlakuan yang lebih terbuka dibandingkan mereka yang dianggap asing atau berbeda secara ideologis. Kunz menekankan bahwa hubungan antara pengungsi dan negara penerima bersifat fleksibel, dan kebijakan terhadap pengungsi sering kali dipengaruhi oleh politik identitas serta persepsi publik (Kunz, 1981).

Dengan menggunakan pendekatan ini, pengungsi Ukraina dapat dikategorikan sebagai *majority-identified refugees*, karena mereka memiliki kedekatan budaya, sejarah, dan agama dengan masyarakat Republik Ceko. Faktor ini turut menjelaskan mengapa pemerintah Ceko, berbeda dengan respons terhadap pengungsi dari Timur Tengah pada krisis 2015, menunjukkan keterbukaan yang jauh lebih besar terhadap

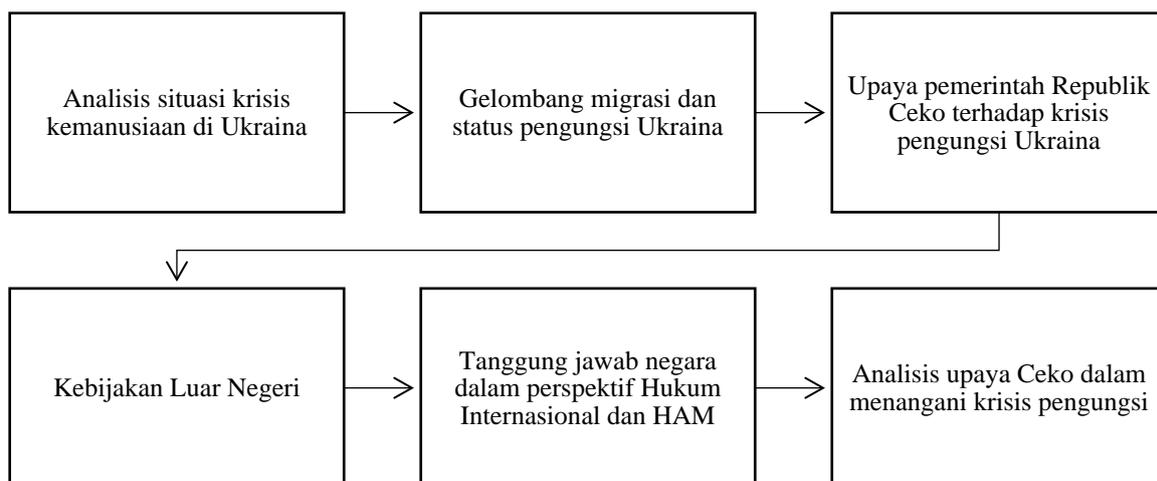
warga sipil Ukraina yang melarikan diri dari konflik. Selain itu, pengungsi Ukraina juga masuk dalam kategori *events-related refugees*, karena migrasi mereka dipicu langsung oleh invasi militer Rusia dan ancaman keselamatan yang tiba-tiba. Teori pengungsi Kunz membantu untuk melihat bagaimana identitas bersama dapat menjadi faktor penentu dalam pembentukan kebijakan negara terhadap pengungsi, dan mengapa respons kebijakan seperti *Lex Ukraine* dan *Temporary Protection Directive* dapat muncul sebagai bentuk solidaritas berdasarkan kesamaan identitas.

### 1.6. Asumsi Penelitian

1. Kedekatan budaya dan sejarah antara pengungsi Ukraina dan masyarakat Ceko mendorong penerimaan yang lebih terbuka dan kebijakan yang lebih proaktif.
2. Pengungsi Ukraina dikategorikan sebagai majority-identified dan events-related refugees, sehingga memengaruhi konstruksi kebijakan Ceko yang bersifat cepat, kolektif, dan berorientasi pada perlindungan.
3. Kebijakan luar negeri Ceko merupakan hasil interaksi aktif antara faktor domestik dan faktor eksternal, di mana negara secara aktif menyesuaikan strategi dan keputusannya untuk menjaga kepentingan nasional serta merespons perubahan dan tekanan di lingkungan internasional.

### 1.7. Kerangka Analisis

**Bagan 1.1 Kerangka Analisis**



Kerangka analisis dalam penelitian ini dimulai dengan mengkaji situasi krisis kemanusiaan yang melatarbelakangi gelombang perpindahan warga ukraina. Invasi Rusia ke Ukraina tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan politik, sosial, dan ekonomi di kawasan Eropa Timur. Konflik ini telah memicu kondisi darurat kemanusiaan yang mendesak, dengan jutaan warga sipil terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka demi mencari perlindungan ke negara-negara tetangga dan kawasan Uni Eropa. Dampak krisis ini menjadi faktor utama yang memicu terjadinya migrasi lintas batas, termasuk masuknya pengungsi dalam jumlah besar ke wilayah Republik Ceko.

Seiring meningkatnya arus migrasi dari Ukraina, selanjutnya pembahasan diarahkan pada status hukum para pengungsi dan bagaimana pengakuan terhadap status tersebut ditangani berdasarkan hukum internasional, khususnya Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai status pengungsi. Dalam konteks Uni Eropa, negara-negara anggota termasuk Republik Ceko juga mengaktifkan EU Temporary Protection Directive (2001/55/EC) yang memberikan perlindungan sementara kepada pengungsi Ukraina. Status ini memberikan hak atas tempat tinggal, layanan kesehatan, pendidikan, serta akses ke pasar tenaga kerja.

Selanjutnya pembahasan mengenai Upaya Pemerintah Republik Ceko yang merumuskan berbagai kebijakan untuk mengelola gelombang pengungsi yang datang. Langkah-langkah strategis yang diambil mencakup penerbitan visa kemanusiaan, penyediaan pusat registrasi darurat, penyediaan tempat tinggal sementara, dan dukungan akses ke layanan publik. Dalam kerangka kebijakan luar negeri, tindakan ini tidak hanya mencerminkan sikap solidaritas Ceko terhadap Ukraina, tetapi juga menegaskan posisi Ceko sebagai negara anggota Uni Eropa yang berkomitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan stabilitas regional. Upaya Ceko mencerminkan peran aktif dalam tatanan kebijakan luar negeri Uni Eropa, di mana isu pengungsi menjadi bagian dari agenda keamanan dan diplomasi kawasan.

Pada akhirnya, kajian diarahkan pada analisis upaya Pemerintah Republik Ceko dalam menangani krisis pengungsi Ukraina, dengan menyoroti bagaimana kebijakan dan tindakan yang diambil mencerminkan tanggung jawab negara dalam kerangka hukum internasional dan perlindungan hak asasi manusia. Aspek seperti prinsip *non-refoulement*, hak atas suaka, serta pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas dan kesesuaian kebijakan tersebut.